
Judul	: Mahasiswa korban bencana, UKT dibebaskan, syarat diringankan
Tanggal	: Sabtu, 13 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Mahasiswa Korban Bencana

UKT Dibebaskan, Syarat Diringankan

ANGGOTA Komisi X DPR Muhammad Hilman Mufidi mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) meringankan beban mahasiswa korban bencana. Mereka dapat bantuan pendidikan berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 1-2.

Kebijakan itu merupakan langkah cepat memastikan keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

"Tapi, pembebasan UKT harus benar-benar kepada yang berhak. Jangan sampai yang tidak berhak dapat, sedangkan yang berhak malah terlewat," tegas Hilman dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Politikus yang akrab disapa Gus Hilman itu meminta Kemendiktisaintek melakukan proses pendataan secara akurat, transparan, dan menyeluruh. Validasi data merupakan kunci agar bantuan pendidikan itu tepat sasaran dan bisa dirasakan mahasiswa yang membutuhkan.

"Kebijakan pembebasan UKT harus benar-benar menyentuh

mahasiswa yang terdampak musibah banjir bandang dan tanah longsor," ujar legislator PKB itu.

Sebagai mitra kerja Kemendiktisaintek, Komisi X DPR akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini.

"Kami ingin memastikan kebijakan ini berjalan tepat, manfaatnya dirasakan mahasiswa dan tidak disalahgunakan," katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidaty menambahkan, kebijakan ini adalah wujud nyata kehadiran negara yang dimantikan masyarakat korban bencana. Namun, yang harus jadi catatan penting adalah, implementasi di lapangan.

"Jangan sampai mahasiswa yang rumahnya hanyut atau orang tuanya jadi korban masih dibebani dengan syarat administrasi yang rumit," tegas Kurniasih, Jumat (12/12/2025).

Legislator PKS itu mendesak agar pihak kampus dan kementerian melakukan aksi "jempol" menggunakan data terpadu



Muhammad Hilman Mufidi

taktis untuk mahasiswa PTS di daerah bencana agar tidak ada yang putus kuliah," harapnya.

Kemendiktisaintek sebelumnya telah merumuskan sejumlah rencana aksi pemulihian atas dampak bencana di Sumatera.

Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Faizan Adziman mengatakan, salah satu langkah yang ditempuh adalah pembebasan UKT 1 hingga 2 semester bagi mahasiswa terdampak, atau dari keluarga terdampak bencana.

Dia menyampaikan, rencana aksi pada tahap pemulihian itu dijadwalkan mulai dijalankan pada Januari 2026, menggunakan anggaran tahun itu. Berikutnya, selain pembebasan UKT, ada enam rencana aksi lain pihaknya untuk membantu para mahasiswa dan korban bencana lainnya.

Pertama, pengadaan dapur umum di berbagai kampus terdampak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kedua, pengaturan Ujian Akhir Semester (UAS) yang fleksibel bagi kampus atau mahasiswa dari

keluarga terdampak. Ketiga, penggalangan bantuan kebutuhan mendesak yang dikirim melalui berbagai kampus di area terdampak.

"Seperti makanan, pakaian, penjernih air bersih, dan pengiriman tenaga kesehatan," jelasnya.

Keempat, pembentukan tim psikososial bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat yang terdampak.

Kemendiktisaintek bekerja sama dengan tim psikolog, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan tenaga terlatih lainnya. Kelima, bantuan fasilitas untuk pembelajaran, pemulihian proses pembelajaran normal. Keenam, pemulihian infrastruktur pembelajaran dan sosial.

Diketahui, setidaknya 60 kampus yang terdiri dari 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 48 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdampak langsung bencana Sumatera. Selain itu, 1.306 dosen dan 18.824 mahasiswa juga jadi korban dalam bencana tersebut. ■ PYB